

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUM DESA) IN BENGKALIS REGENCY

ANALISIS PERMASALAHAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN BENGKALIS

Dewi Junita¹⁾, Oetary Triyani²⁾, Yulia Safitri³⁾, Yolanda Safitri⁴⁾

^{1,2,3,4)}Akuntansi, Universitas Awal Bros

e-mail : dewijunita@univawalbros.ac.id

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) are business institutions engaged in the management of village economic assets and resources within the framework of village community empowerment. BUM Desa is established by the village and/or together with villages to manage businesses, utilize assets, develop investment and productivity, provide services, and/or provide other types of businesses for the greatest welfare of the village community. Thus, the government and community's hopes for the growth of the village economy and community welfare are attached to BUM Desa. In Riau Province, all villages in Riau have BUM Desa, namely 1,591 villages. Bengkalis Regency already has BUM Desa with a total of 136 BUM Desa units. Bengkalis Regency, with its wealth of natural resources and abundant economic potential, has a great opportunity to develop diverse and innovative BUM Desa. However, there are still various problems that hinder its development and sustainability. Some of these problems include lack of human resource capacity, limited capital, ineffective management, and limited access to markets and technology. Overcoming these problems requires comprehensive and sustainable efforts. The purpose of this community service activity is to provide training in analyzing financial reports of Village-Owned Enterprises in Bengkalis Regency to identify root problems and find practical and applicable solutions. Through this community service activity, it is hoped that mentoring, training, and empowerment can be carried out for Village-Owned Enterprise managers and village communities so that they are able to optimize their potential and resources. This community service activity has been carried out in Bengkalis Regency. The participants in this activity are 14 Operational Executors from 14 Village-Owned Enterprises in Bengkalis.

Keywords: *problems analysis; BUM Desa; bengkalis; village-owned enterprises*

ABSTRAK

BUM Desa merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. BUM Desa didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, harapan pemerintah dan masyarakat akan tumbuhnya perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat melekat pada BUM Desa. Di Provinsi Riau, seluruh desa yang ada di Riau telah memiliki BUM Desa yaitu sebanyak 1.591 desa. Kabupaten Bengkalis sudah memiliki BUM Desa dengan jumlah keseluruhan 136 unit BUM Desa. Kabupaten Bengkalis, dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengembangkan BUM Desa yang beragam dan inovatif. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat perkembangan dan keberlanjutannya. Beberapa permasalahan tersebut meliputi kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan modal, manajemen yang kurang efektif, serta keterbatasan akses terhadap pasar dan teknologi. Mengatasi permasalahan ini memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu berupa pelatihan analisis laporan

keuangan BUM Desa yang berada di Kabupaten Bengkalis untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang praktis dan aplikatif. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan dapat dilakukan pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan bagi pengelola BUM Desa serta masyarakat desa agar mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis. Adapun peserta dalam kegiatan ini adalah Pelaksana Operasional BUM Desa yaitu 14 orang Pelaksana Operasional dari 14 BUM Desa di Bengkalis.

Kata Kunci : *analisis permasalahan; BUM Desa; Bengkalis; badan usaha milik desa*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah suatu badan usaha yang diharapkan dapat membantu Desa dengan memberikan kontribusi pada pendapatan Desa (Nugroho, dkk., 2023; Sari, dkk, 2021). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan ekonomi lokal (Arifin, dkk., 2020; Hilmawan, dkk., 2023). Pendirian BUM Desa didasari oleh semangat untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di desa secara optimal, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan desa, dan mendorong kemandirian ekonomi desa.

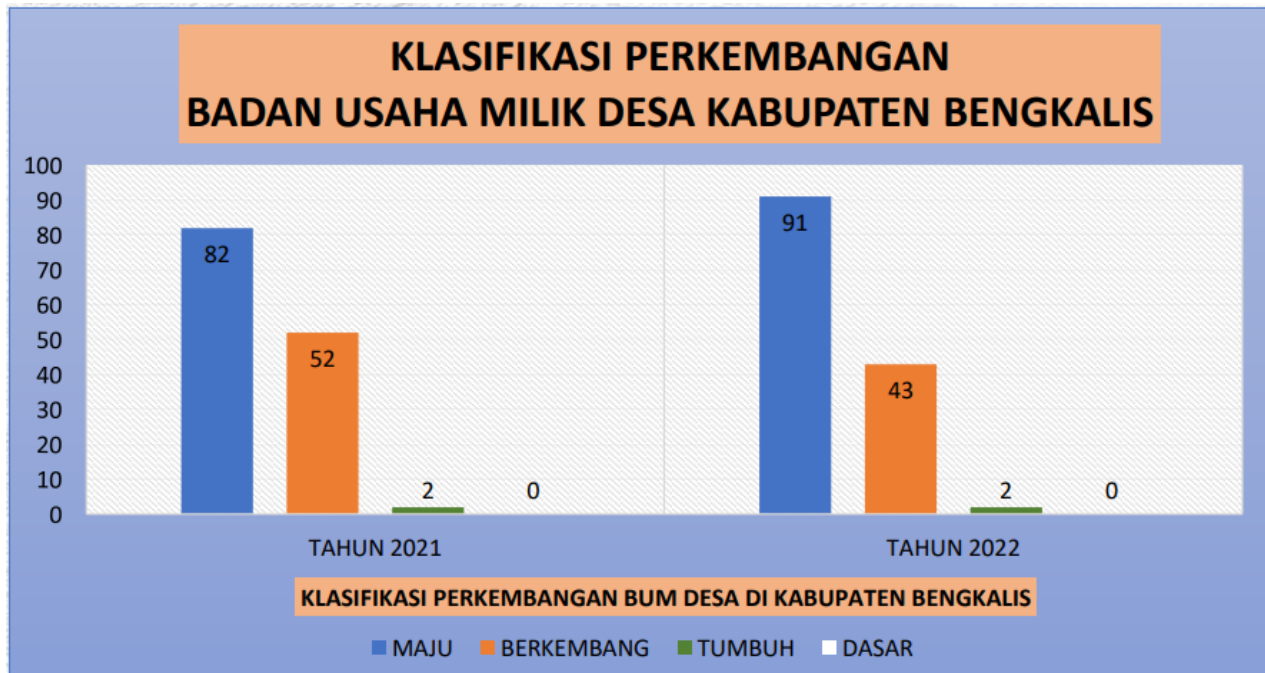
Hingga saat ini, jumlah BUM Desa meningkat jauh dibanding awal tahun 2014. Sebagaimana target pemerintah agar seluruh Desa dapat memiliki badan usaha, sebanyak 60.417 unit BUM Desa sudah berdiri ditahun 2023 (Data Kemendes.go.id). Jika dilihat dari jumlah BUM Desa ini, upaya pemerintah tidak sia-sia dalam mendorong desa desa di Indonesia untuk mendirikan BUM Desa. BUM Desa sebagai harapan baru bagi pemerintah agar pembangunan dan pemerataan ekonomi didesa dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Di Provinsi Riau, sebanyak 1.591 desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, 2020), termasuk BUM Desa yang terletak di kabupaten Bengkalis. Jumlah keseluruhan BUM Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis berjumlah 136 unit BUM Desa. Gambar 1 dibawah ini menunjukkan data klasifikasi perkembangan BUM Desa di Kabupaten Bengkalis.

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa perkembangan BUM Desa dari tahun 2021 dan 2022 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dari 136 unit BUM Desa, sebanyak 91 unit BUM Desa telah tergolong BUM Desa maju di tahun 2022, 43 unit BUM Desa ada diklasifikasi BUM Desa berkembang dan 2 unit BUM Desa sisanya masih dalam klasifikasi Tumbuh. Jumlah ini meningkat dari yang sebelumnya tahun 2021 sebanyak 82 unit BUM Desa status Maju, 52 unit BUM Desa status Berkembang dan 2 unit BUM Desa status Tumbuh.

Kabupaten Bengkalis, dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengembangkan BUM Desa yang beragam dan inovatif. Namun, meskipun banyak BUM Desa telah didirikan, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat perkembangan dan keberlanjutannya. Beberapa permasalahan tersebut meliputi kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan modal, manajemen yang kurang efektif, serta keterbatasan akses terhadap pasar dan teknologi (Kania dkk, 2021; Nasfi dkk, 2023; Prabowo, dkk., 2021; Wance, 2022).

Gambar 1| Data BUM Desa Kabupaten Bengkalis



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau (2023)

Mengatasi permasalahan ini memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan (Badaruddin dkk, 2021). Pengabdian masyarakat yang berfokus pada analisis permasalahan BUM Desa di Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang praktis dan aplikatif. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan dapat dilakukan pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan bagi pengelola BUM Desa serta masyarakat desa agar mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

METODE

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

1. Ceramah
Materi yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan tentang Analisis Permasalahan BUM Desa dan Upaya Pengembangan BUM Desa.
2. Presentasi dari masing-masing BUM Desa
Dilakukan penyampaian dari masing-masing BUM Desa mengenai profil dan kondisi BUM Desa
3. Dialog
Dilakukan dengan dialog dan sesi tanya jawab antara peserta dengan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengenai permasalahan yang ada di BUM Desa.
4. Penutup

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempat Dan Peserta Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Analisis Permasalahan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Bengkalis, peserta dalam kegiatan ini merupakan pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa) yang berjumlah 14 orang pelaksana operasional dari 14 BUM Desa di Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Berlian di Kabupaten Bengkalis.

Hasil FGD

Pada FGD ini masing-masing BUM Desa menyampaikan profil BUM Desa mereka dan pandangan dari Perwakilan DPMD Kab. Bengkalis yang dipandu oleh moderator, Bapak Yanto Adi. Adapun BUM Desa yang menyampaikan profil bisnisnya yaitu:

No.	Nama BUM Desa	Kategori
1	Langgam Sako	Maju
2	Dara Sembilan	Berkembang
3	Setia Pati	Maju
4	Unggul Sari	Berkembang
5	Halwah Pedekik	Maju
6	Maju Bersama	Berkembang
7	Karya Bathin Bersama	Maju
8	Bathin Alam	Berkembang
9	Lestari	Maju
10	Air Putih Jaya	Berkembang
11	Karya Mandiri	Maju
12	Pratama Bantan Sejahtera	Berkembang
13	Sejahtera	Maju
14	Bantan Berkah Bersama	Berkembang

Pada FGD tersebut, diperoleh kesimpulan terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUM Desa yaitu:

1. Kurangnya modal dan sumber daya manusia yang terampil
BUM Desa memiliki keterbatasan modal dan sumber daya manusia yang terampil. Hal ini dapat menghambat pengembangan bisnis BUM Desa dan mengurangi kemampuan mereka untuk bersaing dengan bisnis lain di pasar.
2. Tidak adanya pemahaman yang cukup tentang pengelolaan bisnis
Banyak BUM Desa yang kurang memahami aspek-aspek pengelolaan bisnis seperti manajemen, keuangan, dan pemasaran. Hal ini dapat mengakibatkan BUM Desa tidak efektif dalam menjalankan bisnis dan menghadapi persaingan di pasar.
3. Kurangnya akses pasar
BUM Desa mengalami kesulitan untuk menjangkau pasar yang lebih luas karena terbatasnya jaringan dan sumber daya untuk mempromosikan bisnis mereka.
4. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat

BUM Desa seringkali kesulitan mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam hal modal, pelatihan, dan pengembangan bisnis.

Mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dapat dirangkum untuk berupa:

1. Mencari sumber modal yang dapat membantu memperkuat modal BUM Desa dan memberikan pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia.
2. Memberikan pelatihan atau pendidikan yang fokus pada pengelolaan bisnis sehingga anggota BUM Desa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manajemen, keuangan, dan pemasaran.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan media sosial untuk mempromosikan bisnis BUM Desa, serta menjalin kemitraan dengan bisnis atau organisasi lain untuk membantu memperluas akses pasar.
4. Membangun kemitraan dengan pemerintah dan organisasi lain, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengembangan bisnis BUM Desa sehingga mereka dapat lebih memahami manfaat dari usaha tersebut.



Gambar 2| Kegiatan FGD

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis. Adapun peserta dalam kegiatan ini adalah 14 orang pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dari 14 BUM Desa di Kabupaten Bengkalis. Hasil dari kegiatan tersebut berhasil menggali beberapa permasalahan yang dihadapi BUM Desa dan menciptakan solusi yang dapat dilakukan BUM Desa, Pemerintah dan Pihak Kepentingan lainnya. Dengan hasil FGD yang telah dilakukan, maka ke depan diharapkan BUM Desa dapat menjalankan pengelolaan organisasi yang lebih baik lagi dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat dan Desa.

SARAN

Saran dari kegiatan ini yaitu perlu adanya kegiatan FGD Analisis Permasalahan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten selain Kabupaten Bengkalis. Mengingat pentingnya hal ini dilakukan agar BUM Desa dapat mengenali permasalahan yang dihadapi dan menghadirkan solusi untuk permasalahannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bengkalis, yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., ... & Handoko, R. 2020. Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of rural studies*, 79, 382-394.
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. 2021. Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163-175.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, 2023
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. 2023. Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100159.
- Kania, I., Anggadwita, G., & Alamanda, D. T. (2021). A new approach to stimulate rural entrepreneurship through village-owned enterprises in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 15(3), 432-450.
- Kemendes.go.id
- Nasfi, N., Aimon, H., & Ulfa Sentosa, S. 2023. Build the village economy: A systematic review on academic publication of Indonesian village-owned. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2252682.
- Nugroho, T. W., Rahman, M. S., Toiba, H., Andriatmoko, N. D., Hartono, R., & Shaleh, M. I. 2023. Does financial literacy matter for village-owned enterprises'(VOEs) performance? Evidence from East Java Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2263945.
- Prabowo, E.S., Wiratno, E. and Suparto, S., 2021. Penguatan Kelembagaan BUM Desa Menuju Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. *Dedikasi Sains dan Teknologi (DST)*, 1(1), pp.73-78.

- Sari, R.N., Junita, D., Anugerah, R. and Nanda, S.T., 2021. Social entrepreneurship, transformational leadership and organizational performance: The mediating role of organizational learning. *Polish Journal of Management Studies*, 23(2), pp.464-480.
- Wance, M., 2022. Analisis Permasalahan Pemerintahan, Pengembangan Bumdes, Kemiskinan Masyarakat desa dan Solusi yang ditawarkan Melalui Edukasi Kepada Masyarakat dan Praktek Kuliah Lapangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 2(5), pp.230-238.

